**BAB I**

**PENDAHULUAN**

### 

1. **Konteks Penelitian**

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Depdiknas, 2001).

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

Tujuan komite sekolah dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.

1

1

1. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan salah satu misinya adalah memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Pembinaan pendidikan dasar dan menengah dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasisi sekolah dengan memperkenalkan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di tingkat Sekolah.

Dalam kehidupan suatu bangsa pendidikan (pendidikan formal) mempunyai peran yang amat positif untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan.

Perjuangan Pergerakan Nasional Indonesia yang telah mengantarkan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia yang salah satu intinya adalah: Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan (Hasbulla, 2006:20).

Oleh karena itu sekolah berperan untuk dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik agar mampu melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat dan umat beragama serta pendukung kebudayaan bangsa. Sisi moralnya adalah bahwa hanya sekolah dan masyarakat yang paling mengetahui persoalan pendidikan yang dapat menghambat mutu pendidikan.

Dengan demikian, merekalah yang menjadi pelaku utama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Peran serta masyarakat dalam pendidikan tercantum pada Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 54 (1) tentang Sisdiknas yang berbunyi:

Peran serta Masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di eraotonomi daerah menjadi sedemikian penting. Disamping mengupayakan bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang dikemukakan di atas juga selama ini dirasakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih belum optimal, masyarakat disini dimaksud tidak saja orangtua siswa dan masyarakat sekitar tetapi juga dunia kerja dan dunia industri yang nantinya menjadi pemakai *output* lembaga pendidikan yang ada.

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif d emi kemajuan suatu sekolah.

Otonomi daerah sebagai wahana untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di masyarakat, lancar dan tidaknya realisasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Kemampuan yang dibutuhkan diantaranya adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk mengelola dinamika masyarakat, kemampuan untuk mengalokasikan sumber finansial daya alam, secara tepat memotivasi lembaga-lembaga pendukung pembangunan, serta keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan untuk kemajuan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengkomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah mengacu kepada Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, dan sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat universal, untuk seluruh umat dimanapun dan kapanpun. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan diantaranya kebijakan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep baru ini cenderung disambut dan diapresiasi sebagai sebuah anginsegar dalam proses perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih menintensifkan pelibatan masyarakat

Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU RI No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksaan transformasi konsep komite sekolah memerlukan proses bertahap dari waktu ke waktu, mulai pada tingkat menyadarkan perlunya fungsi komite sekolah baik kepada masyarakat maupun penyelenggara pendidikan sebagai peluang partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Tingkat berikutnya menyebarluaskan konsep pelibatan publik dalam komite sekolah kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan. Berikutnya adalah penyelenggaraan pendidikan melakukan konsultasi ke masyarakat untuk mendapatkan masukan dalam proses menetapkan kebijakannya, kerjasama segenap potensi yang ada di masyarakat secara sinergis dalam bentuk saran dengan penyelenggaraan pendidikan memutuskan kebijakan. Pada tingkat tertinggi adalah tercapainya rasa saling memiliki bahwa komite sekolah sebagai wadah pemecahan masalah bersama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Beberapa alasan peneliti memilih tema diatas adalah: (1) adanya fenomena yang berkembang dimasyarakat terhadap keberadaan komite sekolah dimana berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 197 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diketahui bahwa anggota komite sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Burau adalah sebagaian besar orang tua siswa dan sebagian lagi tokoh masyarakat yang ada di sekolah tersebut. Untuk sekretaris dan bendahara komite adalah guru yang dalam hal ini dianggap sebagai orang yang paham akan pendidikan (2) komite sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih dalam khususnya membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kepengurusan komite di sekolah tersebut sudah berjalan selama dua tahun, dimana hal ini menjadi alasan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Peran Komite Sekolah di SMA Negeri 1 Burau”.

1. **Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah Peran Komite Sekolah di SMA Negeri 1 Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

1. **Tujun Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan
2. Untuk mengetahui Peran Komite Sekolah sebagai pendukung penyelenggara pendidikan
3. Untuk mengetahui Peran komite sekolah sebagai pengontrol penyelenggara pendidikan
4. Untuk mengetahui Peran komite sekolah sebagai mediator penyelenggara pendidikan.
5. **Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
2. Menambah wawasan bagi peneliti, khususnya dalam bidang pendidikan.
3. Sebagai bahan masukan bagi komite sekolah SMA Negeri 1 Burau.
4. Manfaat Praktis
5. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang relevan.
6. Bagi pengurus komite sekolah disetiap jenjang pendidikan khususnya di SMAN 1 Burau agar memperhatikan peranan dan fungsinya sebagai komite sekolah.
7. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya terutama dalam meneliti masalah-masalah komite sekolah.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
   1. **pengertian Peran**

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854). Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertamapenjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam darikalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketikamenduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempattempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bias dimesjid, surau/mushola, dirumah, dan sebagainya ( Syiful Bahri Djamarah, 1997:31).

Jadi, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran guru adalah perangkat tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandangnya. Dalamkaitannya dengan peran, tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya.

8

Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kekurang berhasilan dalam menjalankan perannya. Ada beberapa faktor yang menentukan kekurang berhasilan ini. .Dalam ilmu sosial, ketidak berhasilanini terwujud dalam kegagalan peran, disensus peran dan konflik peran. Kegagalan peran terjadi ketika seseorang enggan atau tidak melanjutkan peran individu yang harus dimainkannya. Implikasinya, tentu saja mengecewakanterhadap mitra perannya. Orang yang telah mengecewakan mitra perannya akan kehilangan kepercayaan untuk menjalankan perannya secara maksimal, termasuk peran lain, dengan mitra yang berbeda pula, sehingga stigma negative akan melekat pada dirinya.

Disensus peran ialah mitra peran tidak setuju dengan apa yang diharapkan dari salah satu pihak atau kedua-duanya. Ketidak setujuan tersebut terjadi dalam proses interaksi untuk menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan perannya. Disini, persoalan bisa berasal dari aktor, bisa juga berasal dari mitra yang berkaitan dengan aktifitas menjalankan peran.

Konflik peran terjadi manakala seseorang dengan tuntutan yang bertentangan melakukan peranyang berbeda. Biasanya seseorang menangani konflik peran dengan memutuskan secara sadar atau tidak peran mana yang menimbulkan konsekuensi terburuk, jika diabaikan kemudian memperlakukan peran itu lebih dari yang lain. Konflik peran yang berlangsung sering terjadi apabila si individu dihadapkan sekaligus pada kewajiban-kewajiban dari dua atau lebih peranan yang dipegangnya. Pemenuhan kewajiban-kewajiban dari peranan tertentu sering berakibatmelalaikan yang lain.

* 1. **Pengertian Komite Sekolah**

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah semakin meningkat,maka persatuan orang tua murid dan guru pada awal tahun 1974 di bubarkan dan dibentuk suatu badan yaitu Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Dalam perkembangan selanjutnya dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka dibentuklah komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik dari jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tanggal 02 april 2002, maka pengertian dan nama komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan,baik pada jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah
2. Nama komite sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan
3. BP3, komite sekolah atau majelis yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran dan keanggotaan sesuai dengan acuan

7

Di samping itu, Hasbullah (2006: 12) mengemukakan bahwa :

komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Komite sekolah hendaknya mempresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah.

Pembentukan komite sekolah berdasarkan Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 sekolah bertujuan sebagai berikut :

* 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan,
  2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
  3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dengan terbitnya keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/UU/2002 tanggal 2 april 2002, maka Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) tidak berlaku lagi. Sebagai penggantinya pada tingkatan satuan pendidikan dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyarakat. UU SPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 53 ayat 3 yang berbunyi:

Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat pendidikan.

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidika

Ketika proses penyusunan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, substansi Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kemudian menjadi salah satu bahan untuk substansi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana kita ketahui, kelahiran UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan pengganti UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan paradigma otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Sebagian besar substansi Kepmendiknas Nomor 044/U/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kemudian dimasukkan (*insert*) utamanya ke dalam pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut:

Pasal 56 (1): Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

# Pasal 56 (2): Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

# Pasal 56 (3): Komita sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

# Pasal 56 (4): Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

# Ketentuan Pasal 56 (4) tersebut pada saat ini masih sedang dirumuskan oleh Kelompok Kerja dalam bentuk RPP tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam waktu dekat RPP tersebut akan segera diterbitkan menjadi PP yang akan menjadi acuan operasional yang lebih rinci tentang proses pembentukan dan pelaksanaan organisasi dan manajemen Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Jadi komite sekolah/madrasah berada pada tingkat satuan pendidikan,karena itu sekolah harus mampu menyakinkan orang tua,pemerintah setempat,dunia usaha dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat di percaya.Dengan demikian sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuannya menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikansi terhadap mutu pendidikan yang akan diperolehnya.

Pada dasarnya posisi komite sekolah berada ditengah-tengah antara orang tua murid,murid,guru,masyarakat setempat,dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi,kepala sekolah,dinas pendidikan,dan pemerintah daerah.Peran komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.

* 1. **Tujuan Komite Sekolah**

Dibentuknya komite sekolah di maksudkan agar adanya wadah organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada penggunaan *(client model),* berbagi kewenangan *(power sharing and advocacy*) dan kemitraan (*patnership* *model)* yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.
   1. **Peran Komite Sekolah**

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dinyatakan bahwa peran komite sekolah adalah sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan *(advisory agency)*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan berasal darikata timbang yang diartikan tidak berat sebelah atau sama berat, adapun memberikan pertimbangan adalah memberikan pendapat tentang baik buruk sesuatu hal.

Komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Untuk menjalankan peran tersebut, menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

1. Kebijakan dan program pendidikan
2. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah
3. Kriteria kinerja satuan pendidikan
4. Kriteria tenaga kependidikan
5. Kriteria fasilitas pendidikan
6. Hal lain yang terkait dengan pendidikan

.

1. Pendukung *(supporting agency)*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa mendukung adalah menyokong, membantu, dan menunjang. Purwanto (1998) mengemukakan bahwa sikap mendukung adalah kesediaan atau kecenderungan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu, apabila kelompok tersebut mendapat rangsangan. Sikap mendukung dapat terjadi pada situasi tertentu, orang, kelompok, nilai-nilai yang terdapat di sekitar manusia.

Bentuk dukungan komite sekolah dapat berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*suporting agency)* berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dijabarkan kedalam fungsi komite sekolah sebagai berikut:

1. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan
2. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
3. Mendorong tumbuhnya erhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
4. Pengontrol *(controlling agency)*

Kontrol atau pengawas berarti “ kegiatan mengukur tingkat efektifitas kerja personel dan tingkat efesiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan” ( Nawawi, 1997: 43). Untuk itu diperlukan kegiatan pengamatan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aspek kegiatan dalam proses pencapaian tujuan. Rosenblatt dalam Uchjana, (1996: 28) menyatakan bahwa pengawasan adalah “proses pengecekan rencana dan pelurusan penyimpangan dari arah yang telah direncanakan suatu aktivitas yang berkesinambungan”

Siagian (2000: 5) mendefinisikan engawasan sebagai keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hany sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Komite sekolah berperan sebagai pengontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Untuk menjalankan peran tersebut, komite sekolah memiliki fungsi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.(Kepmendiknas Nomor 044/U/2002)

1. Mediator

Dalam Kepmendinas Nomor 044/U/2002 disebutka bahwa komite sekolah berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Peran sebagai mediator dijabarkan ke dalam fungsi komite sekolah sebagai berikut: melakukan kerjasama dengan masyarakat: menampung dan menganalisis aspirasi, ide, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Komite sekolah sesuai peran dan fungsinya melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

1. Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Besarnya peran orang tua dan partisipasi masyarkat melalui wadah ini dalam mengelola sekolah implementasinya harus sesuai aturan yang berlaku,bukan berjalan menurut selera orang-orang yang ada dalam badan tersebut.Keikut sertaan ini memang disamping membawa dampak negatif, Agar tidak tumpang tindih kewenangan dan bentuk partisipasi masing-masing, maka perlu dibuat aturan kapan sekolah/madrasah dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan dan kapan pula menjaga jarak.

Apabila komite sekolah sudah dapat melaksanakan keempat perannya tersebut secara baik, diasumsikan bahwa komite sekolah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, keberadaan dan peran komite sekolah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan dan persekolahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Depdiknas (2001 : 17) dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peranan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:

1. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
2. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
3. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
4. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
5. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
6. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
7. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu.

Mengacu pada peranan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, sudah barang tentu memerlukan dana. Dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Komite Sekolah.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi pesertadidik dan warga sekolah. Itulah sebabnya makna paradikma MBS sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan bersama.

Sementara itu, Rosyada (2004 : 35) mengemukakan bahwa komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai brikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
5. Kebijakan dan program pendidikan
6. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
7. Kriteria kinerja satuan pendidikan
8. Kriteria tenaga kependidikan
9. Kriteria fasilitas pendidikan, dan
10. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
11. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
12. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
13. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitasi bagi guru-guru dan siswa untuk belajar sebanyak mungkin sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggung jawabkan.

* 1. **Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah**

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan. Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dimana menurut Depdiknas (2001 : 9) adalah dalam bentuk:

1. Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah.
2. Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya, dan
3. Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak.

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, subtansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah sebagaimana dalam Depdiknas, (2001 : 20):

1. Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak.
2. Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.
3. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah.
4. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah.
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah.
6. Mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah.
   1. **Wewenang dan Kegiatan Komite Sekolah**
7. Wewenang Komite Sekolah

Dalam Nanang Fattah (2004) dinyatakan bahwa komite sekolah mempunyai wewenang sebagai berikut:

* + 1. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah
    2. Bersama-sama sekolah menetapkan rencana strategi pengembangan sekolah
    3. Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah
    4. Bersama-sama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personil sekolah
    5. Bersama-sama sekolah menetapkan RAPBS
    6. Mengkaji pertanggung jawaban program sekolah
    7. Mengkaji dan menilai kinerja sekolah
    8. Merekomendasikan kepala sekolah atau guru yang berprestasi dan memenuhi persyaratan profesionalisme serta administratif secra normatif sesuai sengan landasan hukum untuk promosi dan diajukan kepada pihak berwenang, dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten
    9. Menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan oleh sekolah lain sesuai dengan persyaratan profesionalisme serta administratif secra normatif sesuai dengan landasan hukum untuk dipromosikan dan ditunjuk oleh pihak yang berwenang.
    10. Merekomendasikan kepala sekolah atau guru yang melanggar etika profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum yang berlaku dan diajukan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

1. Kegiatan Pokok Komite Sekolah

Selanjutnya Nanang Fattah (2004 : 161-162) menyatakan bahwa komite sekolah mempunyai kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sekolah sesuai dengan program yang telah ditetapkan
2. Bersama sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sekolah
3. Bersama sekolah menyusun standar pelayan pembelajaran di sekolah
4. Bersama sama sekolah menyusu rencana strategik pengembangan sekolah
5. Bersama sama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program tahunan sekolah termasuk RAPBS
6. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honororium yang diperoleh dari masyarakat kepada sekolah, tenaga guru dan tenaga administratif sekolah
7. Bersama sama sekolah mengembangkan potensi unggulan, baik yang bersifat akademis maupun non akademis
8. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah
9. Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah
10. Mengelola kontribusi masyarakat yang berupa non material (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada sekolah
11. Mengevalusi program sekolah secara profesional sesuai dengan kesepakatan pihak sekolah, meliputi : pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, pengawas keuangan secara berkala dan berkasinambungan
12. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama sama dengan pihak sekolah
13. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar nasional maupun lokal
14. Memberikan motivasi dan penghargaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan
15. Memberikan otonomi secara profesional kepada guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai dengan kaidah dan kompetensi guru
16. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan di sekolah
17. Memantau kualitas proses kualitas pelayanan dan hasiul pendidikan di sekolah
18. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah.
19. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Komite sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks. Namun komite sekolah merupakan nama generik, artinya bahwa nama badan di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran dan keanggotaannya sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002.

Pembentukan komite sekolah sesuai dengan uraian kementerian pendidikan Nasional (2006 : 21) bahwa : komite sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut: (1) komite sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan, (2) komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis, (3) komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahea komite sekolah merupakan satu wadah yang dapat dibentuk secara fleksibel sehingga diharapkan memudahkan untuk dibentuk setiap sekolah kumpulan sekolah. Kondisi ini penting karena keberadaan komite sekolah sangat menunjang dalam mewadahi jalinan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, maka komite sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan di masing-masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. Komite sekolah bisa ikut serta meneliti berbagai permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individual sehingga dapat membantu guru-guru untuk menerapkan pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya.

* 1. **Struktur organisasi komite sekolah**

Organisasi berasal dari kata ’organ’ yaitu struktur dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhannya. Seluruh organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan- hubungan yang melalui orang- orang di bawah pengarahan menejer untuk mengejar tujuan bersama. Menurut James D. Mooney dalam ndyacha (2012), organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I. Bernard dalam ndyach (2012), organisasi merupakan suatu sistem aktifitas kerja sama yang di lakukan oleh dua orang atau lebih.

Jadi, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinsikan secara sadar,dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar keterikatan yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan atau sekelompok tujuan.

Defenisi ini sangat cocok jika diterapkan pada organisasi komite sekolah. Dalam defenisi tersebut terkandung kesatuan sosial,kesatuan sosial dalam hal komite sekolah adalah masyarakat sekolah yang peduli pendidikan yang berinteraksi satu sama lain. Pengertian dikoordinasikan secara sadar bahwa organisasi itu dijalankan berdasarkan prinsi-prinsip manajemen, artinya roda organisasi harus dijalankan berdasarkan prinsi-prisip manajemen modern. Keterikatan yang terus – menerus berarti masyarakat secara sadar merasa terikat dengan sekolah karena mereka peduli dengan pendidikan.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas ada empat tujuan pembentukan komite sekolah, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh (Siagian,1995 : 80) organisasi diartikan:

sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sesorang atau sekelompok yang disebut bawahan.

Kast dan Rosenweing (Gibson,1996 : 58) menyatakan bahwa:

Struktur organisasi merupakan sistem formal yang membagi dan mengkoordinasi tugas dan fungsinya kepada individu dan kelompok agar tujuan dapat tercapai. Selain itu, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen- komponen (unit- unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaiman fungsi- fungsi atau kegiatan- kegiatan yang berbeda- beda tersebut di integrasikan (koordinasi).

Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan antara pengurus dengan anggota, komponen atau bagian, tingkat manajemen, dan saluran komunikasi. Suatu organisasi menspesifikasi pembagian kerja menunjukkan bagaimana tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Stoner (Fattah, 1996) menyatakan bahwa struktur organisasi dibangun oleh unsur-unsur, yaitu (1) spealisasi aktivitas dan kegiatan, (2) standarisasi kegiatan, (3) koordinasi kegiatan, (4) sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, (5) ukuran unit kerja.

Spesialisasi kegiatan mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dan kelompok diseluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit. Standarnisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakgunaan *(prediktability)* aktivitas. Banyak dari prosedur yang ditetapkan dengan memformulasikan aktivitas dan hubungan dalam organisasi. Menstandarnisasi berarti menjadikan seragam dan konsisten yang harus dilakukan oleh anggota, biasanya dengan menggunakan peraturan, urutan jabatan dan program seleksi, orientasi kerja dan keterampilan kerja.

Struktur organisasi diperlukan suatu bagan organisasi yang merupakan fisualisasi dan struktur organisasi yang menggambarkan susunan tugas dan fungsi, bidang atau posisi jabatan dalam organisasi yang menunjukkan berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Satuan atau unit dalam organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam kontak satu sama lainnya dikaitkan atau dihubungkan dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan jalur komunikasi. struktur organisasi akan menjadi jelas jika digambarkan dalam bagan organisasi.

Keseluruhan organisasi menunjukkan dasar pembagian kegiatan-kegiatan organisasi, artinya tugas yang harus ditangani memiliki tugas dan fungsi terkait dalam kerja sama dengan berbagai bagian, sehingga efisiensi arus kerja saling bergantung antara satu bagian dengan bagian lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparansi adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.

Pembentukan dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan tanggung jawab kinerja maupun penggunaan dana kepanitiaan dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Keanggotaan komite sekolah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, ulama, para tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan. Anggota komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, badan pertimbangan desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus ganjil, syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).

Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada. Selain itu, dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi.

Adapun struktur organisasi komite sekolah untuk satuan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

KETUA

Narasumber

Bendahara

Sekertaris

Anggota

Keterangan:

----------------- : Hubungan Koordinatif

: Hubungan instruktif

Sumber: Hasbullah (2006: 102)

Gambar 2.1 stuktur komite Sekolah

**B. Kerangka pikir**

Sejalan dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, sekolah diharapkan dapat membina jalinan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Sebagai bagian dari konsep MBS, pemberdayaan komite/dewan sekolah ini merupakan bentuk manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan bersama. Pemberdayaan Komite/Dewan Sekolah dapat diwujudkan di antaranya melalui pelibatan mereka dalam penyusunan rencana dan program sekolah, RAPBS, pelaksanaan program pendidikan, dan penyelenggaraan akuntabilitas pendidikan.

Dalam sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Atau dengan kata lain sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Lahirnya komite sekolah diharapkan bukan hanya sekedar mengganti nama dari Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) menjadi komite sekolah, tetapi juga memperbaiki mekanisme formal dalam mengelola organisasi baru tersebut. Dengan adanya mekanisme formal seperti struktur organisasi maka akan dapat menentukan tingkat aktivitas peran komite sekolah.

Lembaga inilah yang menetapkan segala kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang berlaku. Selanjutnya komite sekolah perlu merumuskan dan menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah.

Komite sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi yang mewakili masyarakat sekolah yang bersifat otonom menganut asas kebersamaan menuju peningkatan kualitas pelayanan yang prima di sekolah dapat membantu, mengelola, mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, begitu pula yang diharapkan evektivitas pelaksanaan komite sekolah di SMA Negeri 1 Burau.

Berikut skema kerangka piikir dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

PERAN KOMITE SEKOLAH

Pemberi Pertimbangan

*(advisory agency)*

Pendukung

*(Supporting Agency)*

Pengontrol

*(Controlling Agency)*

Penghubung

*(Mediator Agency)*

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau dari perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung. Penelitian deskriptif (Nawawi. 1995) mengartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek objek penelitian (terhadap seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Sugiyono (2012 : 15) mengemukakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositiveme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal,* teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi.*

Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Filsafat positivisme memandang realitas gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit,teramati, terukur,dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Filsafat positivisme sering disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif.

32

**B. kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen aktif sekaligus pengumpul data di lapangan, sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain peneliti adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Dengan adanya kehadiran peneliti secara langsung di lapangan maka dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang di teliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informasi atau sumber data lainnya disini mutlak diperlukan. Dalam penelitian kualitatif ada dua sumber informasi (data) yang hendak diidentifikasi. Hal itu meliputi sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder.

Adapun sumber informasi primer terkait penelitian ini adalah kepala sekolah, dewan guru danpengurus komite sekolah terdiri dari: ketua komite,sekretaris dan bendahara. Selain itu terdapat sumber informasi sekunder yang juga memiliki kaitan langsung dengan penelitian yakni: dokumentasi, file, dan lain-lain.

**C. Lokasi Penelitian**

SMA Negeri 1 Burau merupakan satu-satunya sekolah menengah atas negeri yang ada di lingkungan kecamatan Burau pada khususnya dan Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, SMA Negeri 1 Burau dipilih peneliti sebagai tempat penelitian karena untuk mengetahuai lebih jelas tentang peranan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. SMA Negeri 1 Burau didirikan pada tanggal 28 maret 2005 dan jumlah alumni pertamanya sebanyak 57 orang, jumlah guru di SMA Negeri 1 Burau sebanyak 27 orang dan komite sekolah terdiri dari kepala komite, sekretaris, bendahara dan anggota. SMA Negeri 1 Burau merupakan sekolah yang waktu pembelajarannya dimulai di pagi hari yang mempunyai dua puluh kelas belajar, kantor sekolah, lab IPA, lab komputer, perpustakaan, mushalah dan kantin. Sekolah ini berlokasi di desa lambarese Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

.

**D. Sumber Data**

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif yang berkenaan dengan data yang masih memerlukan pengolahan dan analisis yang berkaitan dengan informasi yang relevan dari penggunaan tersebut.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian, dibutuhkan adanya subyek atau informan penelitian. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, ketua komite sekolah, orang tua siswa dan anggota komite SMA Negeri 1 Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penentuan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan purposife *(purposive sampling)* dengan memilih kepala sekolah sebagai informan penunjang, penentuan kepala sekolah sebagai informan karena merupakan pimpinan sekolah sehingga dapat memberikan data yang benar sesuai dengan informasi yang diperoleh dari pihak komite sekolah.

**E. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah sasaran penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan langsung atau observasi.

Untuk kepentingan ini digunakan teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang ada dilokasi penelitian, digunakan teknik :

1. **Observasi**

Alasan menggunakan metode observasi dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai menegetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang yang tampak. Susan stainback (Sugiyono 2008: 65) mengatakan *“in participant observation the researcher observes what people do, listen to what they say , and participates in their activities”* maksudnya dalam obsevasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerja orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Berkaitan dengan observasi ini, peneliti menggunakan metode partisipasi pasif *(passive participation),* jadi dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan mereka. Partisipasi pasif yang dilakukan oleh peneliti adalah menekankan fokus dari peremasalahan yaitumengamati dan mendengarkan informasi dari kepala sekolah, guru, serta pengurus komite SMA Negeri 1 Burau tentang peran komite sekolah dimana didalamnya terdapat empat peran yaitu sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendukung penyelenggara pendidikan, sebagai pengontrol penyelenggara pendidikan, dan sebgai mediator penyelenggarapendidikan.

1. **Teknik Wawancara**

Mulyana (2001:16) menjelaskan bahwa ”wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan”. Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa: “*interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alon*”. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui oebservasi.

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi dari pikiran, perasaan, pendapat, pengetahuan dari orang-orang yang terlibat proses perumusan dan implementasi kebijakan pengembangan organisasi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan oleh Nasution (1992:69) bahwa:

“Observasi saja tidak memadai dalam melakukan penelitian. Mengamati kegiatan dan kelakuan orang saja tidak dapat mengungkapkan apa yang diamati atau dirasakan orang lain. Itu sebabnya observasi harus dilengkapi oleh wawancara.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semiterstuktur (*Semistructured* *interview*) sebagaiamana yang dikemukakan oleh Sugiono (2007:320) bahwa:

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in*-*depth* *intervew* di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan

1. **Dokumentasi**

Studi dokumentasi berdasarkan pendapat Arikunto (2002 : 206) yang mengatakan bahwa : “Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya”.

Sedangkan menurut Sugiyono (2006 : 329) mengemukakan bahwa: “Studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.”

Studi dokementasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif semakin kredibel setelah didukung dokumen kegiatan yang berhubungan dengan komite sekolah di lapangan.

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis seperti dokumen-dokumen resmi, data-data tertulis mengenai dokumen sekolah(RPS dan RAPBS), dokumen menyangkut organisasi komite sekolah (Struktur Organisasi, Daftar hadir rapat, notulen rapat, buku kas, AD/ART organisasi komite sekolah) di SMA Negeri 1 Burau.

**F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari observasi wawancara dan dokumentasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Selanjutnya utuk menguji Validitas data dalam penelitian ini mengikuti salah satu konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono,2005: 91) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi”.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat akan bersifat kredibel apabila setelah diverifikasi ternyata data-data tersebut yang disimpulkan didukung oleh bukti-bukti yang valid.

Untuk uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus, dan *member check*.

1. **Pengecekan keabsahan data**

Menurut Moleong (2000) “kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu : (1) kepercayaan (*kreadibility),* (2) keteralihan (*transferability),* (3)kebergantungan (*dependibility)*, (4) kepastian (*konfermability)*. Dalam penelitian kualitatif ini memakai tiga macam antara lain :

* + - 1. Kepercayaan (*kreadibility)*

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas tersebut ialah dengan teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi.

* + - 1. Kebergantungan ( *depandibility)*

Kriteria yang digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti itu sendiri hal ini bisa di sebabkan karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan.

* + - 1. Kepastian (*konfermability)*

Kriteria yang digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacak audit.

1. **Tahap-Tahap Penelitian**

Moleong (2000 : 45) mengemukakan bahwa “pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : (1) tahap sebelum kelapangan, (2)tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, 4. tahap penulisan laporan”. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

* 1. Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegitan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan ijin kepada subyek yang akan diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusulan usulan penelitian.
  2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kinerja komite sekolah sebagai badan pendukung *(supporting agency)* di SMA Negeri 1 Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
  3. Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara yang mendalam dengan, ketua komite sekolah, sekretaris komite sekolah, bendahara komite sekolah, anggota komite sekolah dan kepala sekolah. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
  4. Tahap penulisan laporan, meliputi : kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegitan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang kemudian ditindaklanjuti dan langkah terkhir yaitu melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**

Untuk mengetahui Peran Komite Sekolah di SMA Negeri 1 Burau, maka perlu di dasarkan pada komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah itu sendiri yakni Peran Komite sebagai pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator antara sekolah dan pemerintah.

Berdasarkan penelusuran data di lapangan yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1. **Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan *(advisory agency)***

Sehubungan dengan peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peneliti telah melakukan wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut.

Ketika peneliti menanyakan kepada informan IS, Ketua Komite SMA Negeri 1 Burau, Apakah Komite Sekolah pernah mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat ?. Beliau menyatakan bahwa :

Secara administrtif tidak tetapi secara makro ya, karena kami sudah tau tentang kehidupan masyarakat disini, mana masyarakat yang mampu dan mana masyarakat yang kurang mampu.(wawancara tanggal 3 juni)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah tidak pernah melakukan pendataan tentang keadaan ekonomi keluarga peserta didik,karena mereka telah mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hal senada juga dikemukakan oleh MT, kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau, ketika peneliti menanyakan bagaimanakah kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik? beliau menyatakan bahwa:

Komite sekolah pernah melakukan pendataan tentang kondisi sosial konomi keluarga peserta didik ,karena itu merupakan hal yang perlu diketahui oleh pihak sekolah agar kita mengetahui mana siswa yang kurang mampu dan mana siswa yang mampu. (wawancara tanggal 17 juni)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas, bahwa sekolah pernah mendapatkan data dari komite sekolah tentang keadaan sosial ekonomi peserta didik.sehingga sekolah mengetahui mana siswa yang kurang mampu dan mana siswa yang mampu, ini merupakan hal yang sanagat penting yang harus diketahui oleh pihak sekolah dan sudah menjadi tugas bagi komite sekolah sehingga menyampaikan kepada sekolah.

Hal senada dikemukakan oleh FZ, seorang guru SMA Negeri 1 Burau yang menyatakan bahwa:

Ya, komite sekolah pernah melakukan pendataan tentang kondisi sosial ekonomi keluarga pesert didik. (wawancara tanggal 21 juli)

38

Hal tersebut menegaskan bahwa komite dan pihak sekolah selalu memperhatikan keadaan ekonomi kelurga peserta didik.

Sehubungan dengan peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peneliti telah melakukan wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut :

Ketika peneliti menanyakan kepada informan RP, sekretaris komite SMA Negeri 1 burau, bagaimanakah komite sekolah memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, muatan lokal dan penyususnan visi, misi sekolah? Beliau menyatakan bahwa:

Terkait dengan proses belajar mengajar komite sekolah selalu memberikan pertimbangan kepada guru agar guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan kepada siswa,selanjutnya terkait dengan muatan lokal dan penyusunan visi dan misi di sekolah pihak komite selalu memberikan pertimbangan.( wawancara tanggal 30 juni)

Hal tersebut diatas berarti bahwa pengurus Komite Sekolah memberikan masukan kepada sekolah untuk terus menciptakan suasana proses belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IS, ketua komite SMA Negeri 1 Burau, peneliti menanyakan apakah Komite Sekolah memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusuna visi, misi, tujuan dan kegiatan seklah?. Ia menyatakan bahwa:

Ya, kami selaku komite sekolah juga berperan dalam hal penyusunan visi, misi , dan tujuan disekolah karena hal tersebut merupakan penunjang bagi sekolah khususnya dan komite umumnya. (wawancara tanggal 5 juni)

Hal ini mengemukakan bahwa hubungan sekolah dengan komite dalam hal hal pemberi pertimbangan sangat baik, apalagi dalam penyususnan visi, misi dan tujuan sekolah komite sangat berperan.komite juga memberikan masukan kepada sekolah dalam hal perbaikan sarana dan prasarana mengajar serta penambahan pegawai yang tidak tetap.

Lebih lanjut menurut informan IS, ketua komite SMA Negeri 1 Burau mengemukakan bahwa pihak sekolahlah yang lebih memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan visi, dan misi sekolah. Dalam hal memberikan memberikan masukan dan pertimbangan berupa saran-saran tentang perbaikan sarana dan prasarana sekolah, pengurus komite selalu memberikan pendapatnya. Apalagi yang menyangkut dengan program atau kebijakan sekolah komite selalu memberikan masukan kepada sekolah.

Lebih lanjut ketika peneliti menanyakan kepada informan IS, ketua Komite SMA Negeri 1 Burau, bagaimanakah keterlibatan komite dalam memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal? Beliau menyatakan bahwa:

Kami menyarankan kepada pihak sekolah agar jangan menekankan muatan lokal pada mata pelajaran saja tetapi bisa juga dalam hal yang lain seperti muatan lokal pertanian.(wawancara tanggal 6 juni)

Hal diatas dijelaskan bahwa pengurus komite sekolah memberikan masukan dan saran kepada pihak sekolah dalam pengembangan kurikulum khususnya mutan lokal. Sehingga kurikulum muatan lokal tidak diterapkan sebagai mata pelajaran saja tapi juga dapat diterapkan pada muatan lokal pertanian.

Menurut IS, ketua komite SMA Negeri 1 Burau bahwa muatan lokal pertanian dapat membekali keterampilan bagi siswa di masa yang akan datang karena pada umumnya masyarakat diselitar sekolah adalah petani.

Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan di SMA Negeri 1 Burau sudah dapat dijalankan secara optimal. Hal ini kemukakan berdasarkan keterlibatan komite sekolah dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, penyusunan RAPBS, Komite Sekolah hanya memberikan pertimbangan berkaitan dengan penambahan pegawai dan perbaikan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Burau.

1. **Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung Penyelenggara Pendidikan (*supporting agency)***

Berkaitan dengan Peran Komite Sekolah sebagai pendukung penyelenggara pendidikan, peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut :

Ketika peneliti menanyakan kepada informan IS, ketua komite SMA Negeri 1 Burau, pernahkah komite sekolah mencoba mencari dana lain diluar dana komite?. Beliau menyatakan bahwa:

belum pernah kami mencoba melakukan itu, kami hanya berhadap ada sumbangan dari orang tua siswa saja. Kalo berkaitan dengan dukungan dana, kami mengakui masyarakat dalam komite sekolah tetap memberikan bantuannya.(wawancara tanggal 7 juni)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dijelaskan komite sekolah tidak pernah melakukan pencarian sumber dana selain dari sumbangan orang tua siswa. Namun dalam dukungan dana, masyarakat tetap memberikan bantuan dana kepada sekolah.

Lebih lanjut kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau menyatakan bahwa dukungan masyrakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Burau cukup baik, menurutnya kalau sekolah mengadakan rapat akhir tahun ajaran dengan komite sekolah, masyarakat dengan sukarela hadir di sekolah karena rapat yang akan dilakukan adalah untuk membicarakan masalah pembangunan sarana yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak mereka.

Komite sekolah sebagai pendukung mempunyai peran memberikan dukungan seperti dukungan sumber manusia dan mobilisasi tenaga kependidikan guru dan non guru, pada umumnya komite sekolah terlibat memantau kondisi ketenagaan di sekolah serta ikut memotivasi tenaga sukarela untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.

Hal tersebut di benarkan oleh FZ, salah seorang guru di SMA Negeri 1 Burau, dari hasil wawancara beliau menyatakan bahwa :

Yang berkaitan dengan tenaga kependidikan, pengurus komite sekolah juga selalu memberikan dukungannya dalam mencari tenaga sukarela untuk mengganti kekosongan guru. (wawancara tanggal 22 juli)

Hal tersebut menegaskan bahwa pengurus komite sekolah sangat berperan dalam membantu sekolah mencari tenaga sukarela untuk mengnisi kekosongan guru dan pegawai. Lebih lanjut menurut guru tersebut bahwa peran komite sekolah dalam memberikan dukungan ketenagaan dijalankan. Terutama memobilisasi tenaga sukarelawan untuk mengisi kekosongan guru. Kaitannya dengan dukungan pendanaan oleh komite sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan IS, ketua komite SMA Negeri 1 Burau mengemukakan bahwa:

Sebenarnya bantuan komite sekolah sudah cukup banyak, karena setiap tahun itu selalu diadakan rapat dengan orang tua siswa untuk membicarakan apa-apa lagi yang mau di perbaiki di sekolah, memang masih ada yang tidak membayar mungkin karena memang termasuk keluarga kurang mampu tapi pada umumnya orang tua siswa mau menyumbang kesekolah. (wawancara tanggal 10 juni)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dijelaska bahwa bantuan dana masyrakat melalui komite sekolah dalam tiap tahunnya sudah cukup memadai, sekalipun masih ada sebagian beberapa siswa kategori kurang mampu yang belum memberikan sumbangan kepihak sekolah.

Lebih lanjut pengurus komite menyatakan bahwa komite sekolah senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk bantuan dana. Masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah setiap tahun bersatu dalam memberikan bantuan dana ke sekolah. Penarikan dana komite dari masyarakat ditetapkan melalui rapat dan diberlakukan secara merata karena untuk melakukan subsidi silang sangat sulit dilakukan karena belum ada acuan yang dipergunakan untuk menentukan mana masyarakat yang tergolong tidak mampu apalagi pengurus komite sekolah belum melakukan pendataan terhadap keadaan dan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar sekolah.

Dana yaang diberikan komite sekolah digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pembuatan pagar tembok sekolah, perbaikan sarana air bersih dan mushallah sekolah. Bantuan dana komite juga dipergunakan oleh sekolah dalam pengadaan alat-alat pendukung kegiatan proses belajar mengajar seperti komputer, media pembelajaran.

Hal tersebut dibenarkan oleh informan MT, kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau, ketika dinyatakan tentang peran komite sekolah dalam memberikan pendanaan kesekolah, beliau menyatakan bahwa:

Kami pihak sekolah bersama komite sekolah setiap tahun mengadakan rapat untuk membicarakan dengan pihak sekolah tentang sarana yang dibutuhkan dan berapa besar dana sumbangan komite yang ditetapkan pada tahun ajaran.(wawancara tanggal 19 juni)

Hal tersebut menegaskan bahwa dalam penetapan jumlah sumbangan komite tiap awal tahun ajaran, selalu diputuskan melalui rapat bersama antara pihak sekolah dengan pihak pengurus komite sekolah.

Sumbangan dari masyarakat melalui komite sekolah tersebut digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Rencana perbaikan yang dimaksud dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah SMA Negeri 1 Burau setiap tahun, RAPBS yang disusun sekolah setiap tahunnya dibahas dalam rapat pleno pengurus komite, RAPBS tersebut ditanda tangani oleh ketua komite saat melakukan pencairan dana bantuan operasional.

Hal tersebut peneliti menanyakan kepada informan MT, kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau, mengenai apakah pihak komite sekolah melakukan verifikasi RAPBS sekolah? Beliau menyatakan bahwa:

Kalau RAPBS di sahkan oleh ketua komite sekolah karena dana BOS tidak dapat dicaorkan apabila RAPBS tidak disahkan oleh ketua komite, tetapi untuk menyusun RAPBS tersebut pihak sekolah selalu melibatkan komite sekolah biasanya yang hadir untuk pengesahan RAPBS adalah ketua, sekretaris, dan bendahara.(wawancra tanggal 21 juni)

Hal tersebut diatas berarti bahwa pengurus komite sekolah terlibat langsug dalam hal penetapan dan pengesahan RAPBS dalam setiap tahunnya. Selain masalah dana, komite juga sering memberikan dukungannya dalam hal tenaga seperti mengisi kelas yang kosong pada saat jam pelajaran, dan ikut membantu beberapa kegiatan sekolah seperti melatih siswa dalam kegiatan baris berbaris atau jadi narasumber pada pelaksanaan pesantren kilat yang dilaksanakan sekolah setiap tahunnya.

Ketika peneliti menanyakan kepada informan TR, bendahara komite tentang apakah komite sekolah pernah menghimbau masyarakat yang di pandang mampu untuk menjai narasumber dalam kegiatan ekstrakurikuler? Beliau menyatakan bahwa:

Ya pernah, komite sekolah pernah memberikan dukungan seperti melatih siswa dalam kegiatan pramuka, dan komite sekolah juga pernah menjadi pemateri dalam pesantren kilat di bulan suci ramadhan. (wawancara tanggal 7 juli)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dijelaskan bahwa ketua komite sering datang di sekolah memberikan dukungan dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka dan dari pengurus komite ada yang menjadi pemateri dalam pesantren kilat di bulan suci ramadhan

Berkaitan dengan mutu pendidikan sebagai badan pendukung penyelenggara pendidikan di sekolah , penelitian ini telah melakukan wawancara sebagai berikut:

Ketika peneliti menanyakan kepada informan IS, ketua komite SMA Negeri 1 Burau, apakah komite sekolah mendorong agar masyarakat lebih perhatian dan berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu? Beliau menyatakan bahwa:

Ya, kami selaku komite mendorong agar masyarakat lebih perhatian an berkomitmen dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu karena ini semua untuk kepentingan peserta didik atau siswa.(wawancara tanggal 12 juni)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas komite sekolah mendorong masyarakat dan orang tua siswa agar lebih perhatian untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, sehingga bisa bermanfaat bagi siswa baik sekarang maupun kehidupan mendatang.

Hal senada juga dikemukakan oleh informan MT, kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau, beliau menyatakan bahwa:

Komite sekolah memberikan dukungan kepada orang tua dan masyarakat agar lebih memperhatikan dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu.(wawancara tanggal 20 juni)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas, komite sudah menjalankan perannya sebagai pendukung pertimbanganpendidikan khususnya dalam hal meningkatkan pendidikan yang bermutu dan bisa bermanfaat bagi siswa atau peserta didik.

Berdasarkan temuan diatas maka disimpulkan bahwa peran dan fungsi komite sekolah dalam menjalankan perannya sebagai pemberi dukungan baik dana maupun tenaga sudah cukup baik.

1. **Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol Penyelenggara Pendidikan ( *controlling agency)***

Berkaitan dengan peran komite sekolah sebagai poengontrol penyelenggara pendidikan peneliti telah melakukan wawancara dengan informan peneliti yang berhubungan dengan masalah penggunaan dana di sekolah sebagaimana di gambarkan berikut ini:

Ketika peneliti menanyakan kepada informan MT, kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau, apakah komite sekolah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana di sekolah? Beliau menyatakan bahwa:

Menyangkut penggunaan dana di sekolah, dari komite tidak pernah menanyakan tentang penggunaannya, yang jelas penggunaan dana di sekolah dilakukan berdasarkan untuk memenuhi keperluan yang di butuhkan di sekolah.jadi masalah penggunaan keuangan mereka serahkan ke sekolah.(wawancara tanggal 24 juni)

Hal tersebut diatas berarti adalah fungsi komite sekolah sebagai pengontrol tidak berjalan sebagai mana mestinya, pengurus komite sekolah tidak pernah melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah.

Lebih lanjut kepala sekolah menyatakan bahwa peran komite sekolah sebagai pengawas belum dapat dijalankan secara efektif oleh pengurus komite. Dalam hal program dan penggunaan dana di sekolah, komite sekolah saat ini jarang melakukan evaluasi ataupun pengawasan di sekolah.

Menurut informan MT, kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau bahwa dalam hal penggunaan dana, sekolah selalu terbuka kepada komite, hal ini dilakukan dalam bentuk memajang RAPBS dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Berkaitan dengan penggunaan dana di sekolah, komite sekolah tidak melakukan pengawasan seperti disampaikan oleh salah seorang informan TR, bendahara komite SMA Negeri 1 Burau, ketika peneliti menanyakan apakah komite sekolah juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS? Beliau menanyakan bahwa:

Komite sekolah hanya memberikan saran untuk menggunakan dana tersebut dikelola dengan baik dan tepat sasaran, semestinya komite disini berperan lebih penting dalam penggunaan dana tersebut tetapi komite hanya memberikan saran agar dana tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan sekolah tersebut.(wawancara tanggal 12 juli)

Berdasarkan penjelasan narasumbe di atas dijelaskan bahwa sekolaha mengharapkan kepada komite sekolah untuk memantau penggunaan dana di sekolah sehingga informasi kepada masyarakat tentng penggunaan dana bisa dilakukan secara tranparan.

Menurut IS, ketua komite SMA Negeri 1 Burau menyatakan bahwa komite sekolah tidak mempertanyakan tentang penggunaan dana disekolah karena para pengurus komite sekolah sepenuhnya percaya terhadap penggunaan dana di sekolah. Menurut ketua komite, kepala SMA Negeri 1 Burau sudah ditransparan dalam hal menggunakan dana, ini dibuktikan dari minmnya keluhan para guru dan masyarakat tentang pemanfaatan dana di sekolah.

Lanjut ketua komite menyatakan bahwa komit sekolah juga tidak ingin terlalu jauh memasuki atau mencapuri kewenangna sekolah tentang penggunaan anggaran karena merupakan hal yang sangat sensitif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IS, ketua komite SMA Negeri 1 Burau mengemukakan bahwa kami pengurus komite tidak ingin terlalu jauh ikut campur dalam hal penggunaan dana, itu kami lakukan untuk menjaga hubungan baik antara pihak pengurus komite sekolah dengan pihak sekolah.(wawancara tanggal 11 juni)

Hal itu memberi penekanan bahwa ada asumsi dari komite sekolah bahwa ketika komite sekolah terlalu ikut campur dalam hal penggunanan dana disekolah itu akan dianggap sebagai salah satu prasangka tidak percaya yng bisa berakibat paa retaknya hubungan komite dengan pihak sekolah.

Disamping kurangnya pegawasan terhadap pemanfaatan dana sekolah, peneliti menanyakan kepada informan FZ, salah seorang guru di SMA Negeri 1 Burau, apakah komite sekolah meminta penjabaran tentang hasil belajar siswa.? Beliau menyatakan bahwa:

Komite sekolah biasa meminta penjabaran tentang hasil belajar siswa di sekolah, dan komite juga selalu aktif dalam skolah. (wawancara tanggal 24 juni)

Hal tersebut dibenarkan oleh MT, kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau, beliau menyatakan bahwa komite sekolah memang pernah meminta penjabara tentang hasil belajar siswa di sekolah, itu lakukan agar komite sekolah tahu seberapa besar hasil output sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara degan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah belum mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai pengawasan terhadap penggunaan anggaran di sekolah dan hasil belajar siswa di sekolah, ini disebabkan karena pengurus komite percaya terhadap kebijakan, program, penyelenggaran, dan keluaran pendidikan.

1. **Peran komite sekolah sebagai mediator**

Komite sekolah sebagai perantara mempunyai peran penghubung antara sekolah dengan masyarakat atau antara sekolah dengan pihak pemerintah. Peran ini dijalankan dengan cra mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala sekolah. Sehubungan dengan peran komite sebagi mediator, peneliti telah melakukan wawncara dengan berbagai informan diantaranya:

Ketika peneliti menanyakan kepada informan FZ, salah seorang guru di SMA Negeri 1 Burau, apakah komite sekolah pernah menyebarkan kuisioner kepada masyarakat untuk memperoleh masukan, saran da ide kreatif dari masyarakat? Beliau menyatakan bahwa:

Belum pernah, kami hanya menerima saran dari masyarakat secara langsung saja, ketika kami bertemu di mesjid atau di tempat lain,masyarkat yang langsung menyampaikan sarannya kepada komite. (wawancara tanggal 24 juni)

Berdsarkan penjelasan narasumber diatas dijelaskan bahwa masukan atau aspirasi dari masyarakat seringkali juga di sampaikan secara langsung ke kepala sekolah tanpa melalui komite karena beberapa orang tua siswa juga bisa datang ke sekolah.

Sehubungan denga peran komite sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat, komite sekolah juga berperan s bagai penghubung antara sekolah dengan pemerintah, peneliti telah mempertanyakan kepada salah seorang informan MT, kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau, apakah komite sekolah pernah menyampaikan aspirasi sekolah kepada pemerintah? Beliau menyatakan bahwa:

Ya pernah, komite sekolah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah,tentang fasilatas atau sarana prasarana di sekolah sampai dengan kedaan atau kondisi di sekolah yang menyangkut dengan masalah kesiswaan.(wawancara tanggal 25 juni)

Dari hasil wawncara diatas disimpulkan bahwa komite sekolah sudah mampu menjalankan perannya dengan baik, dan menjadikan hubungan sekolah dengan pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat berjalankan dengan baik, sehingga pemerinth juga dapat membantu sekolah baik dalam bantuan sarana prasarana maupun kebijakan.

Dilain waktu ketika hal tersebut di konfirmasikan dengan salah seorang informan IS, ketua komite SMA Negeri 1 Burau, peneliti menanyakan hal yang sama, apakah komite sekolah pernah menyampaikan aspirasi sekolah kepada pemerintah? Beliau menyatakan bahwa:

Kami pengurus komite selalu berusaha supaya hubungna sekolah dengan pemerintah tetap terjalin dengan baik dan setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat kami sampaikan kesekolah, agar sekolah mengetahui hasil rapat yang disampaikan kepada sekolah sehingga menjadikan hubungan sekolah dengan pihak komite dapat berjalan dengan baik.(wawancara tanggal 12 juni)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa komite sekolah ingin hubungan sekolah dengan masyarakat atau pemerintah tetap terjalin dengan baik, sehingga masyarakat autupun pemerintah dapat membantu sekolah dalam menjalankan perannya.

Lanjut informan IS, menyatakan bahwa kami selaku pengurus komite selalu menyampaikan aspirasi sekolah kepada pemerintah daerah, sehinga menurut komite sudah berjalan dengan baik dimana setiap aspirasi masyarakat yang dihasilkan melalui musyawarah pada saat melakukan rapat senantiasa disampaika kepada sekolah.

Ketika peneliti menanyakan kepada salah seorang informan FZ, salah seorang guru SMA Negeri 1 Burau, bagaimana peran komite sekolah sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak sekolah? beliau menyatakan bahwa:

Peran komite sekolah sebagai penghubung dengan masyarakat belum sepenuhny aberjalan dengan baik, ini terbukti dari bila ada siswa yang bermaslah, orang tua siswa langsung datang kesekolah bukan mellaui komite sekolah, padahal yang seperti ini harus disampaikan kepada komite terlebih dahulu atau pengurus komite yang menyampaikan kepada pihak sekolah. (wawancara tanggal 25 juli)

Bedasarkan hasil wawancara dengan guru dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah sebagai penghubung belum dapat dijalankan dengan baik, karena masih ada diantara orang tua siswa menyampaikan secara langsung pengaduannya kepada sekolah apa bila ada siswa yang bermaslah tanpa menyampaikan dulu kepada pengurus komite sekolah.

Namaun guru tersebut juga mengakui bahwa hubungan antara guru di sekolah dengan masyarakat sejak dulu terjali dengan baik, hal ini terlihat dari baiknya hubungan sosial antara masyarakat dengan pihak sekolah, maka ketika ada anggota masyarakat yang melakukan hajatan baik perkawinan, acara keluarga atau ada anggota masyarakat yang berduka maka pengurus komite bersama sama dengan pihak sekolah mendatangi rumah masyarakat yang melaksanakan hajatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa komite sekolah mampu melaksanakan perannya sebagi penghubung dengan baik, itu terbukti bahwa komite telah menyampaikan aspirasi sekolah kepada pemerintah daerah dan menjadikan hubunga sekolah denga masyrakat berjalan dengan baik.

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**
2. **Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (*advisory agency).***

Mengacu pada indikator kinerja komite sekolah dalam menjalankan perannya sebagai badan pertimbangan maka berdasarkan temuan peneliti dilapangan berkaitan dengan peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan dapat dinyatakan bahwa komite sekolah SMA Negeri 1 Burau sudah mampu menjalankan perannya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap perencanaan sekolah, pelaksanaan program serta pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan rencana kegiatan sekolah dan berbagai program lainnya berjalan cukup baik.

Dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah ditandai dengan semakin meningkatnya keikutsertaan masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah dalam memberikan pertimbangan tentang penyusunan perencanaan dan pembiayaan sekolah. Keterlibatan komite dalam memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan sumber daya pendidikan semakin memberi kejelasan bahwa komite sekolah dalam memberikan dukungannya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Burau.

1. **Peran Komite Sekolah sebagai Pendudkung Penyelenggara Pendidikan (*supporting agency)***

Berdasarkan pada informasi yang diberikan pada oleh sumber data di lapangan bahwa diantara beberapa peran komite sekolah, maka peran komite sebagai pendukung dalam penyelenggraaan pendidikan di SMA Negeri 1 Burau sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, bentuk dukungan yang diberikan berupa dukungan dana maupun tenaga.

Dukungan komite sekolah dalam penyelenggraan pendidikan di SMA Negeri 1 Burau masih sangat perlu di tingkatkan. Keberadaan komite sebagai partner dari sekolah diharapkan mampu mendorong komitmen dan perhatian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Kegiatan tersebut baik yang bersifat formal maupun sosial antara lain mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan tenaga pendidikan yang memadai beserta mencari solusi terhadap kurangnya tenaga pendidik di sekolah.

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat dan dunia usaha industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu di kelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu komite sekolah.

Sebagaimana dikemukakan suparlan (2006 : 17-19), salah satu fungsi komite sekolah adalah menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggraan pendidikan di satuan pendidikan. Dana atau keuangan suatu sekolah pada dasarnya dapat dicari apabila sekolah bersama komite sekolah memiliki ide dan gagasan kreatif menciptakan aktifitas peningkatan mutu pendidikan yang memerlukan pembiayaan serta memiliki kemampuan menjalin kerjasama secara sinergis diantara semua stakeholder pendidikan.

Komite sekolah memilki peran strategis, khususnya berkaitan dengan penggalangan dana, memiliki peluang yang sangat besar untuk berperan aktif dan lebih besar dalam peningkatan mutu pendidikan ditingkat satuan pendidikan. Dukunga yang diberikan oleh komite sekolah tidak hanya dalam bentuk dana, melainkan juga dalam bentuk tenaga, ide dan gagasan.

1. **Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol Penyelenggara Pendidikan *(control******agency)***

Berdasarkan pada keterangan narasumber di lapangan tentang peran komite sekolah sebagai pengontrol atau badan yang berfungsi melakuan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Burau belum dapat dijalankan oleh para pengurus komite.

Hal tersebut diatas menunjukkan lemahnya kewajiban sekolah SMA Negeri 1 Burau dalam memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan kinerja sekolah terhadap masyarakat pengguna sekolah. Sementara di sisi lain, untuk mengukur kinerja sekolah secara obyektif perlu ada indikator yang jelas. Sistem pengawas perlu diperkuaat dan hasil evaluasi harus dipublikasikan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Sekolah dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh karena itu komite sekolah sebagai pengontrol semestinya lebih banyak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap sekolah.

Menurut hasbullah (2006: 95) peran komite sekolah secara optimal termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan sehingga transfaransi alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggung jawabkan. Komite sekolah seyogyanya mamapu mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Sejalan dengan ini siagin (1990) mengatakan bahwa pengontrolan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1. **Peran Komite Sekolah sebagai Mediator Penyelenggara Pendidikan (*mediator agency)***

Berdasarkan pada keterangan narasumber di lapangan menunjukkan bahwa peran komite sekolah di SMA Negeri 1 Burau sebagai penghubung antara sekolah dengan pemerintah sudah dijalankan dengan baik. Sebagai badan mediator komite sekolah mampu menjalankan peran sebagai penghubung baik antara pihak sekolah dengan pemerintah maupun antara sekolah dengan masyarakat.

Suparlan (2006 : 17-19) menyatakan bahwa komite sekolah sebagai penghubung, seyogyanya dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemesyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu serta dapat membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan di sekitar sekolah.

Dalam penyelenggaraan sekolah yang baik, posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua siswa, guru, masyarakat setempat dan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dianas pendidikan dan pemerintah daerah di pihak lainnya, komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya.

Sebagaimana yang di harapkan bersama bangsa Indonesia, yaitu adanya penyelenggaraan pendididkan berkualitas yang pada akhirnya akan menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai hal tersebut penyelenggara pendidikan tidak dapat hanya menggantungkan sepenuhnya kepada sekolah akan tetapi perlu adanya partisipasi atau kontribusi dari berbagai pihak yang terkait , termasuk masyarakat pada umumnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi harapan bangsa yang berkaitan dengan dunia pendidikan diantaranya adalah dibentuknya komite sekolah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bermakna dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Untuk melihat peran komite sekolah harus memahami dengan baik fungsi dan peranya.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **KESIMPULAN**

Dari hasil pengamatan dan analisis data dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan di SMA Negeri 1 Burau sudah berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan Komite Sekolah dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, penyusunan RAPBS, komite sekolah memberikan pertimbangan berkaitan dengan penambahan pegawai dan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah.
2. Peran komite sekolah sebagai pendukung penyelenggara pendidikan di SMA Negri 1 Burau dijalankan dengan cukup baik yaitu berupa dukungan dan tenaga. Hal ini di buktikan dari dukungan komite dalam kegiatan ektrakurikuler atau pesanten yang dilakukan sekolah.
3. Peran komite sekolah sebagai pengontrol penyelenggara pendidikan di SMA Negri 1 Burau belum mampu dijalankan dengan baik. Ini terbukti dari pengawasan terhadap penggunaan anggaran di sekolah dan hasil belajar siswa di sekolah, ini disebabkan karena pengurus komite percaya terhadap kebijakan, program, penyelenggaran, dan keluaran pendidikan.
4. Peran komite sekolah sebagi penghubung dilaksanakan dengan baik, itu terbukti bahwa komite telah menyampaikan aspirasi sekolah kepada pemerintah daerah dan membina hubungan sekolah dengan masyrakat sehingga berjalan dengan baik.

65

1. **SARAN**

Berdasrkan kesimpulan tersebut diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya komite sekolah diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan dengan membuat perencanaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta dapat memberi pertimbangan, dukungan dan pengontrol terhadap segala kebijakan yang dilaksanakan satuan pendidikan serta dapat menjadi mediator antara masyarakat dengan pihak sekolah dan pemerintah dalam pelayanan pendidikan.
2. Komite sekolah dalam pemilihan kepengurusan baru, supaya memilih pengurus yang benar-benar mempunyai waktu dan kesiapan untuk menjadi pengurus bukan melihat pekerjaan atau jabatan yang dimiliki sehingga komite dapat menjalankan program dan rencana kerjanya sesuai yang telah ditetapkan dan di programkan.
3. Kepada sekolah agar kiranya melibatkan komite sekolah dalam pengalokasian anggaran dan pengelolaan anggaran, hal ini dimaksudkan agar kinerja komite sekolah lebih baik lagi dan koordinasi komite sekolah dan pihak sekolah mengenai masalah anggaran bisa lebih baik lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amri.M.Ali.Latif.2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*. (Buku 1). Jakarta : Depdiknas. 2001

Fattah, Nanang.1996.*Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan* *Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Gibson. 1996. *Organisasi*,Bandung:Remaja Rosdakarya

Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.* Jakarta: Rajawali Pers

Hadi, Sutrisno. 2004. *Metode Research*. Jilid 2. Yogyakarta : ANDI

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Depdikbud

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Moleong, Lexy, L. 2000. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya

Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Sosia..*Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Nawawai, Hadari. 1997. *Administrasi Pendidikan.*Jakarta: Gunung Agung.

Ndyach. 2012*. Organisasi-di-lingkungan*, (online),<http://ndyacha.blogspotcontoh-organisasi-di-lingkungan.html> di akses pada tanggal 11/02/2013

Purwanto, M. Ngalim. 1998. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rosyada, Dede.2004.*Paradikma pendidikan Demokratis,sebuah model pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*.Jakarta.Kencana.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

------ 2006*. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

------ 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif. Cetakan ke 4.* Bandung: Alfabeta

------ 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif. Cetakan ke 14.* Bandung: Alfabeta

Siagian,Sondang,1995.*Filsafat Administrasi*. Gunung Agung

----- 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suparlan, 2006, *PemberdayaanI Komite Sekolah,* Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : PT Restindo Mediatama

LAMPIRAN

**Hasil observasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| no | ASPEK OBSERVASI | PERNAH | KADANG-KADANG | TIDAK PERNAG |
| 1 | Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan   1. Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS, memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBS. 2. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran guru. 3. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana dan tenaga kependidikan |  |  |  |
| 2 | Peran komite sekolah sebagai pendukung penyelenggara   1. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholders di lingkungan sekolah 2. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung penyelengaraan pembelajaran yang bermutu 3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah 4. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan |  |  |  |
| 3. | Peran komite sekolah sebagai pengontrol   1. Mengontrol proses pengambilan keputusan. 2. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah 3. Memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah. 4. Memantau hasil ujian akhir. |  |  |  |
| 4. | Peran komite sekolah sebagai mediator.   1. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan 2. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala sekolah 3. Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat. 4. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah 5. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah dan sumber daya masyarakat. 6. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat. |  |  |  |

**Pedoman wawancara:**

1. **Peran Komite Sekolah sebagai pemberi Pertimbangan**
2. Pernahkah komite sekolah memberikan masukan atau pertimbangan kepada sekolah dalam hal penyususnan visi, misi, tujuan dan kegiatan sekolah?
3. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didk,apakah komite sekolah pernah mengajukan data-data sumber daya masyarakat kepada sekolah?
4. Terkait dengan kegiatan sekolah pernahkah komite sekolah memberikan rekomendasi kepada sekolah,mohon dijelaskan rekomendasi seperti apa yang di berikan
5. Apakah komite sekolah pernah memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah dalam rangka pengembangan kuriklum muatan lokal?
6. Pertimbangan seperti apa yang iberikan ketika kepala sekolah mengajukan RAPBS?
7. Untuk memverifikasi RRAPBS yang diajukan sekolah,apakah komite sekolah mengadakan rapat pleno untuk membahas RAPBS?
8. Apakah komite sekolah pernah memberikan pertimbangan kepada sekolah berkaitan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah?
9. Apakah komite sekolah pernah memberikan pertimbangan mengenai sarana dan prasarana sekolah?
10. **Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung**
11. Apakah komite sekolah pernah memberikan dukungan kepada sekolah dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kependidikan?
12. Berkaitan dengan dukungan dana ke sekolah, pernahkan komite sekolah mencoba mencari sumber dana lain diluar dana komite?
13. Apakah komite sekolah pernah mencari bantuan dana dari dunia industri untuk biaya pembebasan aung sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu?
14. Apakah komite sekola pernah menerima bantuan dana dari alumni sekolah?
15. Dalam hal apa saja bantuan komite sekolah dipergunakan?
16. Sejauh manakah kontribusi komite sekolah selama ini terhadap sekolah baik menyangkut dukungan dana maupun dukungan pikiran?mohon jelaskan
17. Apakah komite sekolah melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa?
18. Apakah komite sekolah mendorong agar masyarakat lebih perhatian dan berkomitmen meujudkan pendidikan bermutu.?
19. **Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol**
20. Menurut komite sekolah, apakah pihak sekolah selama ini akuntabel dan bersedia memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang terkait program dan pendanaan sekolah?
21. Berkaitan dengan dana BOS, sejauh mana peran komite sekolah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS tersebut?
22. Pernahkah komite sekolah melakukanpengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan program di sekolah? Mohon dijelaskan
23. Apakah komite sekolah juga melakukan pengawasan terhadap efektifitas kegiatan belajar mengajar di sekolah?
24. Pernahkah komite sekolah meminta penjabaran kepada sekolah tentang hasil belajar siswa? Mohon dijelaskan pada saat kapan hal tersebut dilakukan
25. Pernahkah komite sekolah melakukan pengawasan terhadap efektifitas kinerja tenaga kependidikan di sekolah, seperti tata usaha di sekolah?
26. Apakah komite sekolah pernah menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil pengamatan di sekolah?
27. **Peran Komite Sekolah sebagai Mediator**
28. Apakah omite sekolah membantu menciptakan hubungan atau kerjasama antara sekolah dengan pemerintah? Mohon dijelaskan
29. Apakah yang dilakukan komite sekolah dalam rangka meningkatkan hubungan sekolah dengan pemerintah?
30. Apakah komite sekolah mengadakan rapat secara rutin atau insidental dengan kepala sekolah dan dewan guru terkait kebijakan baru pemerintah di bidang pendidikan?
31. Apakah komite sekolah pernah mengajukan kepada pemeintah terkait perbaikan sarana sekolah?
32. Apakah komite sekolah pernah menyebarkan kuisioner untuk memperoleh masukan, saran, ide kreatif dari masyarakat?
33. Pernahkah komite sekolah membantu hubungan antara sekolah dengan DUDI?
34. Pernahkah komite sekolah mengadakan penjajakan kerjasma atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan skolah?

**Nama-nama Responden**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1. | H.Muh.Mustadir.S.pd.M M | Kepala sekolah |
| 2. | Muh. Iqbal samad,SH | Ketua komite |
| 3. | Ruspin.S.pd | Sekretaris |
| 4. | Tenri Rajeng,S.SI | Bendahara |
| 5. | Faisal Akbar.S.pd | Guru |

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 044/U/2002**

**TENTANG**

**DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**Menimbang :**

1. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal;
2. bahwa dukungan dan peranserta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri;
3. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH.**

**Pasal 1**

1. Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
2. Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

**Pasal 2**

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/U/1993 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 April 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

1. MALIK FADJAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Pemuda di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Pemuda di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Semua Bupati/Walikota,
7. Semua Gubernur,
8. Semua Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota,
9. Semua Ketua DPRD Kabupaten/Kota,
10. Komisi VI DPR RI.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pndidikan Nasional

Kepala Bagian Penyusunan Rancanagan

Peraturan perundang-undangan

Muslikh, S.H.

NIP.131479478

SALINAN

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDID1KAN NASIONAL NOMOR 044/U/2002 TANGGAL 2 APRIL 2002**

**ACUAN PEMBENTUKAN DEWAN PENDID1KAN**

I. **PENGERTIAN, NAMA, DAN RUANG LINGKUP**

1. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota,
2. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing, seperti Dewan Pendidikan, Majelis Pendidikan, atau nama lain yang disepakati.
3. Ruang lingkup pendidikan meliputi pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

II. **KEDUDUKAN DAN SIFAT**

1. Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten/kota;
2. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah.

III. **TUJUAN**

Dewan Pendidikan bertujuan untuk:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

IV. **PERAN DAN FUNGSI**

Dewan Pendidikan berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:

a. kebijakan dan program pendidikan;

b. kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;

c. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;

d. kriteria fasilitas pendidikan; dan

e. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;

1. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

V. **ORGANISASI**

1. **Keanggotaan Dewan Pendidikan**

a. Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:

1. Unsur masyarakat dapat berasal dari:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;

b. tokoh masyarakat;

c. tokoh pendidikan;

d. yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);

e. dunia usaha/industri/asosiasi profesi;

f. organisasi profesi tenaga pendidikan;

g. Komite Sekolah.

2. Unsur birokrasi/legislative dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan (maksimal 4-5 orang).

b. Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.

2. **Kepengurusan Dewan Pendidikan**

a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Ketua:

2. Sekretaris;

3. Bendahara;

b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;

c. Ketua bukan dari unsur pemerintah daerah dan DPRD.

3. **Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)**

a. Dewan Pendidikan wajib memiliki AD dan ART;

b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan:

2. Dasar, tujuan dan kegiatan;

3. Keanggotaan dan kepengurusan;

4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;

5. Keuangan;

6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;

7. Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

VI. **PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN**

1. **Prinsip Pembentukan**

Pembentukan Dewan Pendidikan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut

a. transparan, akuntabel, dan demokratis

b. merupakan mitra pemerintah Kabupaten/Kota

2. **Mekanisme Pembentukan**

a. Pembentukan Panitia Persiapan

1. Bupati/Walikota dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan.Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).
2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
3. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah, Komite Kabupaten, Komite Pendidikan Luar Sekolah) tentang Dewan Pendidikan menurut Keputusan ini;
4. Menyusun kriteria dan mengindentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
5. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
6. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
7. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
8. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan;
9. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati/Walikota:
10. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati/Walikota menetapkan Dewan Pendidikan.
11. **Penetapan pembentukan Dewan Pendidikan**

Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

VII. **TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI**

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif.

VIII. **PENUTUP**

1. Pembentukan Dewan Pendidikan dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.
2. Pembentukan Dewan Pendidikan dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar danMenengah, gedung E lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta telpon (021) 5725613, 5725608, fax (021) 5725608, website www.depdiknas.go.id, email: dpkp2002@yahoo.com

**SALINAN**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 044/U/2002 TANGGAL 2 APRIL 2002**

**ACUAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH**

I. **PENGERTIAN, NAMA, DAN RUANG LINGKUP**

1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan etisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
2. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.
3. Bp3, komite sekolah dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.

II. **KEDUDUKAN DAN SIFAT**

1. Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan;
2. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya;
3. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

III. **TUJUAN**

Komite Sekolah bertujuan untuk:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

IV. **PERAN DAN FUNGSI**

Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

a. kebijakan dan program pendidikan;

b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);

c. kriteria kinerja satuan pendidikan;

d. kriteria tenaga kependidikan;

e. kriteria fasilitas pendidikan; dan

f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;

Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

V. **ORGANISASI**

1. Keanggotaan Komite Sekolah

a. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:

1. Unsur masyarakat dapat berasal dari:

a. orang tua/wali peserta didik;

b. tokoh masyarakat;

c. tokoh pendidikan;

d. dunia usaha/industri;

e. organisasi profesi tenaga pendidikan;

f. wakil alumni;

g. wakil peserta didik.

1. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).

b. Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.

2. Kepengurusan Komite Sekolah:

a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Ketua:

2. Sekretaris;

3. Bendahara;

b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;

c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.

3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

a. Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART;

b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan:

2. Dasar, tujuan dan kegiatan;

3. Keanggotaan dan kepengurusan;

4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;

5. Keuangan;

6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;

7. Perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi.

VI. **PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH**

1. Prinsip Pembentukan

Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. transparan, akuntabel, dan demokratis;

b. merupakan mitra satuan pendidikan.

2. Mekanisme Pembentukan

a. Pembentukan Panitia Persiapan

1. Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orangtua peserta didik.
2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
3. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut Keputusan ini;
4. Menyusun kriteria dan mengindentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
5. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
6. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
7. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
8. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
9. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan pendidikan:

b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

1. Penetapan pembentukan Komite Sekolah Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

VII. **TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI**

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan

pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

VIII. **PENUTUP**

1. Dalam Pembentukan Komite Sekolah, kepala satuan pendidikan dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan Komite Sekolah dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.
3. Pembentukan Komite Sekolah dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung E Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, telpon (021) 5725613, 5725608, fax (021) 5725608, website www.depdiknas.go.id email: dpkp 2002@yahoo.com

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Bagian Ketiga**

**Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah**

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XVI**

**EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI**

**Bagian Kesatu**

**Evaluasi**

Pasal 57

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3),

Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4),

Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6),

Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3),

Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2),

Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62 ayat (4),

Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DANPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan

system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan

pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional

1. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem

pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional.

1. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada

anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut.

**Pasal 195**

(1) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

(2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

(3) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Bupati/walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh bupati/walikota.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada

bupati/walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan

Pendidikan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan usulan dari:

a. organisasi profesi pendidik;

b. organisasi profesi lain; atau

c. organisasi kemasyarakatan.

**Bagian Keenam**

**Komite Sekolah/Madrasah**

**Pasal 196**

(1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

(3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan,

saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

(4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan

satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.

(6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.

(7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:

a. Pemerintah;

b. pemerintah daerah;

c. masyarakat;

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

**Pasal 197**

(1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:

a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);

b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan

c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

(2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat

dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:

a. mengundurkan diri;

b. meninggal dunia; atau

c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;

d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan

sekretaris.

(5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.

(6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

(7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/ madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

**Bagian Ketujuh**

**Larangan**

**Pasal 198**

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun

kolektif, dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;

c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;

d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau

e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

**BAB XV**

**PENGAWASAN**

**Pasal 199**

(1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 200**

(1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah melaksanakan:

a. pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan tinggi;

b. pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangannya;

c. pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Indonesia di luar negeri;

d. koordinasi pengawasan secara nasional terhadap pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan

e. pengawasan terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintah daerah untuk pendidikan.

(3) Pemerintah provinsi melaksanakan:

a. pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan

bertaraf internasional atau yang dirintis untuk menjadi bertaraf internasional;

b. pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan

khusus dan layanan khusus; dan

1. koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi

kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

(4) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah dalam

melaksanakan tugas koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c.

(5) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

**Pasal 201**

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:

a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan

b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

**Pasal 202**

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Pasal 203**

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 201 ayat (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

**Pasal 204**

(1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Nasional dilaporkan kepada Menteri.

(3) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Provinsi dilaporkan kepada gubernur.

(4) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada bupati/walikota

**Pasal 205**

(1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/ wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

**BAB XVI**

**SANKSI**

**Pasal 206**

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup

satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 185 ayat (1).

**Pasal 207**

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat

memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau

pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan,

penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan

pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,

Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2) dan

ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 ayat (1),

Pasal 131 ayat (5), Pasal 162 ayat (2), dan Pasal 184.

**Pasal 208**

(1) Perseorangan atau kelompok anggota civitas akademika perguruan tinggi yang

melaksanakan kebebasan akademik dan/atau otonomi keilmuan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, dikenai sanksi

administratif oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak mengenakan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengenakan sanksi kepada pelanggar dan

kepada pejabat yang tidak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perguruan tinggi atau unit dari perguruan tinggi yang melaksanakan kebebasan

akademik dan/atau otonomi keilmuan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang

melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92, dikenai sanksi

administratif oleh Pemerintah berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan,

penutupan, dan/atau dicabut izin penyelenggaraannya.

(4) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis,

penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan perguruan tinggi yang

melaksanakan dharma perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 209**

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

169 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau

dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

**Pasal 210**

Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelenggarakan pendidikan nonformal

baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 115 dapat dikenai sanksi administratif

berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan dari Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah.

**Pasal 211**

Satuan pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 122, dan Pasal 123 dikenai sanksi administratif berupa

teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan oleh Menteri.

**Pasal 212**

(1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dikenai sanksi administratif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) dikenai sanksi sesuai

dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal

43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 48 ayat

(1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga,

apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan

pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 175 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa

teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat,

pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian

dengan tidak hormat dari jabatannya.

**Pasal 213**

(1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan:

a. bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dan Pasal 154; atau

b. berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (1); dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya.

**Pasal 214**

(1) Penyelenggaraan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh

perwakilan negara asing atau lembaga pendidikan asing yang tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (2) sampai dengan

ayat (8) dikenai sanksi oleh Menteri berupa teguran tertulis dan/atau penutupan satuan

pendidikan.

(2) Satuan pendidikan negara lain yang menyelenggarakan pendidikan bekerja sama

dengan satuan pendidikan di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dan Pasal 163 ayat (2) dikenai

sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan

pendidikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

(3) Satuan pendidikan Indonesia yang melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan

satuan pendidikan negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2), Pasal 166 ayat (2), dan Pasal 167 ayat (3) dikenai

sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan

pendidikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

**Pasal 215**

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1),

Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,

penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Pemerintah

atau atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 216**

* + - * 1. Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenai sanksi administratif berupa teguran

tertulis oleh Pemerintah atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang dalam menjalankan

tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (4) serta fungsi komite sekolah/madrasah

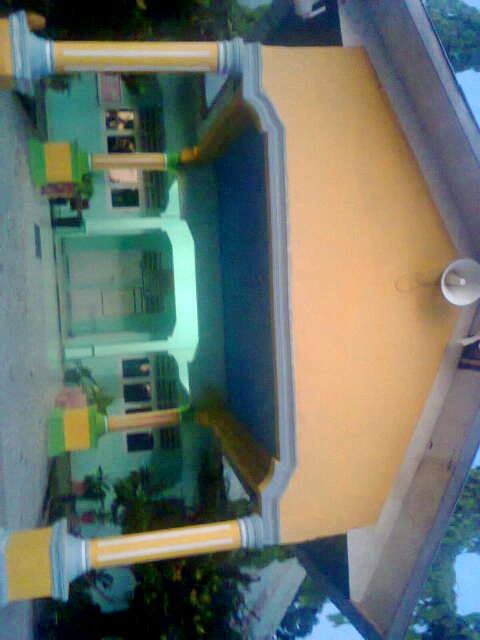
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa

teguran tertulis oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya.

GAMBAR DOKUMENTASI



Gambar 1: Lokasi SMA Negeri 1 Burau

Gambar 2 : Kantor SMA Neg. 1 Burau



Gambar 3 : Musholla SMA Neg. 1 Burau





Gambar 5 : Perpustakaan SMA Neg. 1 Burau

Gambar4 : Aula SMA Neg. 1 Burau



Gambar 6 : Lab IPA SMA Neg. 1 Burau





Gambar 1: wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Burau







Gambar 2 : wawancara dengan guru SMA Negeri 1 Burau







Gambar 3: wawancara dengan komite sekolah SMA Negeri Burau